



Judul : Pemerintah Diminta Hati-hati Terapkan Perpres 40/2016
Tanggal : Kamis, 13 Februari 2020
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 12

Pemerintah Diminta Hati-hati Terapkan Perpres 40/2016

JAKARTA - Pemerintah diminta berhati-hati dalam menerapkan Perpres 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Pasalnya, jika pemerintah mengambil keputusan untuk menurunkan harga gas di lokasi pelanggan (*plant gate*) hingga ke level USD6 per MMBTU, maka dampak ekonominya harus terukur.

Anggota Komisi VII DPR dari fraksi PDIP Falah Amru mengatakan, berdasarkan Perpres 40/2016, untuk menetapkan harga gas bumi tertentu dilakukan melalui penyesuaian harga beli gas bumi dari kontraktor dan tanpa mengurangi bagian kontraktor. Artinya implementasi beleid itu akan mengurangi penerimaan bagian negara dari hulu.

"Implementasi Perpres 40/2016 sangat tergantung pada seberapa besar keuangan negara atau APBN bisa dikurangi penerimaan bagiannya dari hulu," kata Falah di Jakarta,

baru-baru ini.

Dia menegaskan, sesuai Perpres 40/2016, penurunan harga gas harus bisa mengukur nilai tambah yang dapat diberikan oleh sektor industri terhadap perekonomian nasional. Dengan begitu, berkurangnya penerimaan negara dapat terkonsversi dari pertumbuhan kinerja industri.

"Pengorbanan negara yang telah dilakukan melalui pengurangan bagian negara dari hulu harus bisa terpulihkan (*recovery*) dengan nilai tambah yang sebanding atau bahkan lebih besar yang diberikan oleh industri. Pemerintah juga harus bisa menjawab dan memastikan tercapainya tujuan penciptaan nilai tambah ini," ujar Falah.

Sementara itu, Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Muliayanto menuturkan, peran PGN dalam pembangunan infrastruktur dan jaringan gas bumi harus terus diperkuat. Selama ini PGN telah terbukti

mampu membangun berbagai infrastruktur dan mengalirkan gas bumi ke berbagai sektor. "Kami bangga sekali PGN mampu menjalankan skenario besar di sektor migas ini. Penggunaan gas bumi akan mampu mengurangi energi fosil yang banyak diimpor," katanya.

Oleh karena itu, Muliayanto mendukung adanya opsi mengurangi pendapatan negara di sektor hulu atau PPN di hulu dalam penerapan Perpres 10/2016. Ia juga menilai, pelaksanaan DMO gas bumi merupakan salah satu opsi yang baik untuk menjamin ketersediaan gas dan terciptanya pengendalian harga hingga level konsumen.

"Kita harus dukung agar PGN konsisten membangun memperluas infrastruktur gas. Bahkan, ada baiknya jika iuran migas yang diterima pemerintah dialokasikan untuk membangun infrastruktur gas bumi," katanya.

rahmat baihaqi